

AKTUALISASI DEMOKRASI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN TARUNA POLITEKNIK PENGAYOMAN INDONESIA

Muhammad Hasan Al Madani¹, M. Abizar Alghiffari², Mahendra³, Mohammad Bhamakerti
Edra Prasetyo⁴, Willy Virman Sakradeo Hamonangan Sibuea⁵
^{1,2,3,4,5}Politeknik Pengayoman Indonesia

Corresponding Author Muhammad Hasan AlMadani,
Email: muhammadhasanalmadani@gmail.cmm

Abstract

This study aims to describe the actualization of Pancasila Democracy values in the lives of cadets at the Indonesian Correctional Polytechnic (Politeknik Pengayoman Indonesia/Poltekin). Pancasila Democracy is implemented through the values of popular sovereignty, deliberation, social justice, participation, the protection of human rights, the prevention of oligarchy, the balance between freedom and justice, and sustainable development, all of which are reflected in the daily lives of cadets within the official higher education environment. This study employs a normative legal research method using a qualitative approach through a literature review of various academic sources and institutional policies, including legislation, scientific journals, books, and official documents relevant to the research topic. The findings indicate that the values of Pancasila Democracy are actualized in the lives of cadets through deliberative decision-making, fair disciplinary practices, respect for differences of opinion, active participation in cadet organizations, and social activities that foster a spirit of togetherness. This actualization is reflected in the cadet organizational system, leadership selection mechanisms, character-building programs, and social interactions that promote deliberation, responsibility, solidarity, and democratic leadership. This study confirms that Pancasila Democracy has been meaningfully actualized in the lives of Poltekin cadets. However, its implementation still needs to be strengthened through the optimization of Pancasila-based character education, the development of more participatory and well-structured deliberative forums, democratic leadership education, and the integration of Pancasila-based digital literacy into the character education curriculum in order to develop cadets who are democratic, responsible, socially just, and committed to upholding human rights.

Keywords: *pancasila democracy; cadets of the Politeknik Pengayoman Indonesia; actualization*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan bentuk aktualisasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekin). Demokrasi Pancasila diimplementasikan melalui nilai-nilai kerakyatan, musyawarah, keadilan sosial, partisipasi, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan oligarki, keseimbangan kebebasan dan keadilan, serta pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam perilaku kehidupan taruna di lingkungan pendidikan kedinasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber akademik dan kebijakan kelembagaan, meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa nilai-nilai Demokrasi Pancasila teraktualisasi dalam kehidupan Taruna melalui penerapan musyawarah dalam pengambilan keputusan, kedisiplinan yang berkeadilan, penghargaan terhadap perbedaan pendapat, partisipasi aktif dalam organisasi ketarunaan, serta kegiatan

sosial yang menumbuhkan semangat kebersamaan. Aktualisasi tersebut tercermin dalam sistem organisasi taruna, mekanisme pemilihan kepemimpinan, kegiatan pembinaan karakter, serta interaksi sosial yang menumbuhkan semangat musyawarah, tanggung jawab, solidaritas, dan kepemimpinan demokratis. Penelitian ini menegaskan bahwa Demokrasi Pancasila telah diaktualisasikan secara nyata dalam kehidupan Taruna Poltekpin, namun implementasinya masih perlu diperkuat melalui optimalisasi pendidikan karakter berbasis Pancasila, pengembangan forum musyawarah yang lebih partisipatif dan terstruktur, pendidikan kepemimpinan demokratis, serta integrasi literasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan karakter guna membentuk taruna yang berjiwa demokratis, bertanggung jawab, berkeadilan sosial, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia

Katakunci: demokrasi Pancasila, taruna Politeknik Pengayoman Indonesia, aktualisasi

Article Information : Received: 18 November 2025

Accepted: 10 Juni 2026

1. Pendahuluan

Demokrasi sudah menjadi bentuk pemerintahan paling umum diterapkan di berbagai negara. Baik negara yang berpendapatan tinggi sampai berpendapatan rendah yang menjadikannya sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun penerapannya berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan konteks budaya, sejarah, dan politik masing-masing, namun esensinya tetap sama yakni memberikan ruang kepada warga untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan. Popularitas demokrasi tidak lepas dari keyakinan bahwa sistem ini mampu menjamin kebebasan, kesetaraan, serta keadilan bagi seluruh warga negara. Prinsip negara demokrasi adalah menjunjung tinggi konstitusi serta menjamin kebebasan hak sosial dan politik warga negara agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.¹ Karena itu, demokrasi dipandang sebagai bentuk pemerintahan paling ideal yang menempatkan rakyat sebagai pusat kekuasaan dan penentu masa depan bangsanya.

Kata “demokrasi” lahir dari bahasa latin, *demokratia*, yang bermakna pemerintahan oleh rakyat, dari gabungan *demo* (rakyat) dan *kratos/kratein* (kekuasaan atau pemerintahan). Abraham Lincoln, Presiden AS ke-16, menegaskan bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah sebuah bentuk penyelenggara

negara berdasarkan pada partisipasi warga negara, oleh warga negara untuk kesejahteraan warga negara. Dalam sistem demokrasi, rakyat atau masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Abraham Lincoln menegaskan bahwa rakyat adalah pemilik sah negara dan lembaga-lembaganya.² Oleh karena itu, kapan pun mereka merasa lelah dengan pemerintah yang ada, rakyat dapat menggunakan hak yang dijamin konstitusi untuk memperbaikinya, atau mengambil langkah revolusioner untuk membubarkan hingga meruntuhkannya.

Definisi Menurut Joseph A. Schumpeter, demokrasi merupakan pengaturan institusional yang memungkinkan individu atau kelompok elit untuk merebut kekuasaan pembuatan keputusan politik. Perebutan kekuasaan ini dilakukan melalui mekanisme perjuangan kompetitif dalam rangka memenangkan hati dan suara rakyat dalam pemilu.³ Inti dari demokrasi adalah kekuasaan rakyat, suatu konsep yang menempatkan masyarakat sebagai pemegang otoritas paling tinggi dalam negara. Prinsip dasar demokrasi adalah kekuasaan itu berasal dari, dijalankan oleh, dan demi kepentingan rakyat. Dalam konsep kedaulatan rakyat, partisipasi politik masyarakat merupakan wujud nyata pelaksanaan kedaulatan tersebut karena rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan arah penyelenggaraan negara.⁴ Pada pemaknaan tersebut menuntut partisipasi yang lebih luas, kekuasaan juga melibatkan unsur kebersamaan dengan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyatlah yang secara

¹ Roy Marthen Moonti and Muten Nuna, “Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Independency of Social-Political Rights and Participation of Citizen in Democratic System In,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110–24.

²Dikdik Baehaqi Arif, *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik Dan Wawasan*

Kebangsaan Di Perguruan Tinggi, ed. Maulana Aenul Arif (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014).

³ John E. Elliott, “Joseph A. Schumpeter and the Theory of Democracy,” *Review of Social Economy* 52, no. 4 (1994): 280–300, <https://doi.org/10.1080/758523325>.

⁴ Sekar Ar-ruum Samaragrahira, “Partisipasi Politik Dalam Konsep Kedaulatan Rakyat” 2 (2023): 312–17.

hakiki diakui sebagai sumber utama kekuasaan, penentu arah kebijakan, sekaligus pelaksana utama kehidupan bernegara.

Terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk demokrasi, antara lain Demokrasi Konstitusional, Parlementer, Terpimpin, Pancasila, Rakyat, dan Nasional. Sejak Republik Indonesia berdiri, perkembangan demokrasi telah melalui berbagai dinamika. Masalah utama yang kita hadapi sebagai bangsa adalah bagaimana masyarakat dengan keragaman budaya yang tinggi dapat meningkatkan kualitas perekonomian, kehidupan sosial dan politik yang tetap demokratis.

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Konsep ini merupakan pemerintahan yang didasarkan pada norma dasar Pancasila, atau pemerintahan dari, oleh, dan untuk warga negara yang dilaksanakan sesuai dengan sila dalam Pancasila. Demokrasi Pancasila menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pelaksanaan demokrasi tidak hanya menekankan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial.⁵ Singkatnya, demokrasi yang diterapkan Pemerintah Republik Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu sistem berlandaskan dan diarahkan oleh norma/nilai Pancasila berperan sebagai cerminan hidup bangsa.

Secara mendasar, demokrasi Indonesia ialah perwujudan nilai fundamental Pancasila ke dalam sebuah bentuk dan sistem pemerintahan yang spesifik atau khas Pancasila. Sistem yang diterapkan Indonesia sekarang berupa Demokrasi Pancasila yang masih berada dalam fase pengembangan dan penguatan berkelanjutan. Hal ini penting karena Pancasila sebagai dasar negara memuat konsep demokrasi yang unik dan memiliki signifikansi tersendiri bagi bangsa Indonesia.

⁶Menurut Ayu Putri, Berikut adalah poin-poin penting mengenai konsep dan keutamaan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila:

1. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Demokrasi Pancasila mengutamakan keterlibatan masyarakat untuk penentuan kebijakan secara langsung maupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan ini harus selalu didasarkan pada pertimbangan akal sehat yang bijaksana.
2. Musyawarah untuk mufakat. Asas musyawarah dalam Pancasila menekankan urgensi untuk memperoleh keputusan bersama (mufakat) melalui proses dialog dan konsultasi. Hal ini merupakan karakteristik utama dari model demokrasi konsensual di Indonesia.
3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan demokrasi berlandaskan Pancasila wajib menimbulkan dampak yang bermanfaat bagi seluruh warga negara, sehingga dapat memastikan terpenuhinya aspek keadilan sosial secara merata.
4. Partisipasi rakyat. Konsep demokrasi ini secara eksplisit menjamin adanya peran serta aktif dari rakyat dalam proses penentuan kebijakan, yang pada gilirannya memperkuat hak-hak sekaligus kewajiban warganya.
5. Perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi yang berasal dari Pancasila menghasilkan jaminan perlindungan komprehensif terhadap hak dasar warga negara, mencakup kebebasan berekspresi, berserikat, dan beragama.
6. Mencegah oligarki. Sistem ini mendorong keterlibatan politik dari berbagai elemen masyarakat secara luas, yang berfungsi sebagai mekanisme pencegahan penumpukan kekuasaan pada segelintir orang atau kelompok.
7. Keseimbangan antara kebebasan dan keadilan. Demokrasi Pancasila memprioritaskan kesetaraan antara kebebasan individual dan keadilan sosial, akibatnya dapat mencegah

⁵ Refi Amelia, Deah Irena, and Siti Tiara Maulia, "Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Politik Indonesia," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023): 3–8, <https://doi.org/10.572349/civilia.v1i1.328>.

⁶ Putri Ayu Nabila et al., "Konsep Dan Urgensi

Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Pemerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024).

terjadinya penyelewengan kebebasan yang merugikan kepentingan umum.

8. Pembangunan yang berkelanjutan. Demokrasi yang berpijak pada Pancasila dapat memfasilitasi pembangunan yang bersifat lestari (sustainable development), mengingat bahwa masyarakat memegang hal krusial dalam menentukan pemimpin dan menyusun pembangunan nasional.

Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi dijalankan oleh bangsa Indonesia, yang berlandaskan dan dipadukan dengan nilai luhur Pancasila. Dalam pengertian lebih jauh, Demokrasi Pancasila mencerminkan kedaulatan warga negara yang berasaskan norma/nilai Pancasila di semua bidang khususnya politik, ekonomi, dan sosial. Sedangkan dalam pengertian sempit, Demokrasi Pancasila ialah pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui proses musyawarah dan perwakilan berdasarkan hikmat kebijaksanaan. Pada hakikatnya, Demokrasi Pancasila merupakan seperangkat norma/nilai yang mengelola pelaksanaan kedaulatan rakyat serta penyelenggaraan sistem kenegaraan pada bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Norma ini diterapkan pada seluruh warga Indonesia di skala pusat maupun lokal.⁷

Dalam konteks pendidikan tinggi, pelaksanaan norma-nilai Pancasila sangat penting sebagai pembentuk karakter bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam pengembangan etika, moral, serta perilaku taruna. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan tinggi di memiliki tanggung jawab untuk menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sisi kehidupan kampus. Keberagaman bentuk pendidikan tinggi di Indonesia memberikan masyarakat berbagai pilihan untuk mengembangkan pengetahuan melalui jenjang pendidikan tersebut. Salah satu alternatif yang

dapat ditempuh masyarakat adalah pendidikan kedinasn.

Pendidikan pada sekolah kedinasn tidak sebatas berorientasi pada pencapaian akademik, melainkan pada pembentukan karakter, kedisiplinan, dan semangat pengabdian kepada negara. Hal tersebut selaras dengan tujuan bangsa republik indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan filsafat hidup. Dalam konteks ini, aktualisasi nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai demokrasi, menjadi penting untuk membentuk taruna yang berintegritas dan memiliki kesadaran moral sebagai abdi negara. Aktualisasi adalah proses untuk mewujudkan pemahaman terhadap norma dan nilai melalui perbuatan dan perilaku yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Aktualisasi Demokrasi Pancasila merupakan pengaplikasian nilai-nilai Demokrasi Pancasila terhadap aturan atau etika yang berlaku di masyarakat Indonesia dalam kehidupan masyarakat Indonesia dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dalam hal tersebut, aktualisasi memiliki keterkaitan yang kuat dengan perwujudan nilai. dalam kehidupan Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia.

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar arah kehidupan berbangsa semakin memudar. Kondisi ini tampak dalam hasil penelitian yang mengungkap bahwa sebagian generasi milenial memandang budaya lokal secara negatif serta menunjukkan kecenderungan meningkatnya individualisme sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi.⁹ Selain itu, berbagai penyebab luar seperti kondisi sosial, kemajuan teknologi, dan derasnya informasi juga berpengaruh terhadap cara taruna menafsirkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari (Sayoto & Daryono, 2019).¹⁰

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, pertanyaan esensial yang perlu dikaji dalam kajian ini yaitu bagaimana aktualisasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila dalam kehidupan taruna

⁷ Efendi Susanto, "Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini," *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 84–93, <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93>.

⁸ Melviana et al., "AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KONTEKS KEKINIAN," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2253–59.

⁹ Devyanne Oktari and Dinie Anggraeni Dewi,

<https://anwarpublisher.com/index.php/jic>

"Pemicu Lunturnya Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial," *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 93–103, <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1170>.

¹⁰ Sayoto and Daryono, "Analisis Dampak Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Terhadap Perilaku Mahasiswa (Studi Kasus Di Kampus Universitas Semarang)," *Forum Ilmu Sosial* 46, no. 1 (2019): 83–103, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/fis.v46i1.21169>.

Politeknik Pengayoman Indonesia. Penelitian ini berfokus untuk menelaah dan menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila mampu diaktualisasikan melalui implementasinya pada lingkungan sekolah kedinasan, terutama dalam kehidupan taruna Politeknik Pengayoman Indonesia.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menelaah kontribusi dari setiap aspek utama demokrasi pancasila yang meliputi kerakyatan, musyawarah mufakat, keadilan sosial, partisipasi, perlindungan hak asasi manusia, pencegahan oligarki, keseimbangan kebebasan dan keadilan, serta pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam perilaku. Lebih lanjut, penelitian ini juga dikhususkan untuk mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi oleh taruna dan sekolah kedinasan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui sistem pendidikan, serta menganalisis peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan implementasi pada nilai-nilai tersebut dalam kehidupan akademik, sosial, dan kedinasan.

Sehingga penelitian ini dimaksudkan dapat mendeskripsikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pendidikan kedinasan dalam mengaktualisasi Demokrasi Pancasila dalam kehidupan taruna Politeknik Pengayoman Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dikenal dengan penelitian yuridis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum yang berlaku melalui bahan hukum yang relevan.¹¹

Metode ini digunakan karena fokus penelitian bukan pada data empiris lapangan, melainkan pada pemahaman konseptual, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu

yang berkorelasi dengan aktualisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila pada konteks pendidikan kedinasan. Artikel ini menggunakan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaahan dan pengkajian berbagai teori serta sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian tersebut.¹² Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Identifikasi sumber, yaitu menelusuri berbagai referensi akademik dan regulatif dari beragam referensi berkaitan dengan topik meliputi buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang membahas nilai-nilai Pancasila, demokrasi Pancasila, dan kehidupan taruna di lingkungan pendidikan kedinasan, khususnya Politeknik Pengayoman Indonesia.
2. Inventarisasi dan klasifikasi, yaitu mengelompokkan sumber data berdasarkan topik penelitian.
3. Analisis isi (*content analysis*), yaitu menelaah isi dari setiap sumber untuk menemukan pola-pola, prinsip, dan relevansinya terhadap konsep aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan taruna Politeknik Pengayoman Indonesia.¹³

Analisis data dalam pembuatan laporan hasil penelitian dilakukan secara deskriptif karena menggunakan metode kualitatif, sehingga menuntut pemaparan yang luas dalam penyajiannya serta mengharuskan peneliti menyusun laporan yang mampu membuat pembaca seakan-akan hadir dan terlibat langsung dalam situasi penelitian¹⁴, dengan menekankan pada interpretasi makna dan hubungan antarkonsep berdasarkan konteks kehidupan taruna.

Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam hubungan antara konsep demokrasi Pancasila dan praktik kehidupan taruna Poltekipin. Sebagaimana diungkapkan oleh¹⁵Miles dan Huberman, pengolahan data dalam

¹¹ Bintang Adi Putra et al., "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026): 97–112.

¹² Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

¹³ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers,"

MidSens '09 - International Workshop on Middleware Tools, Services and Run-Time Support for Sensor Networks, Co-Located with the 10th ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference, 2020, 1–6.

¹⁴ Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka."

¹⁵ A. Michael Miles, Mathew B; Huberman, *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press), 1992).

kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan berkelanjutan sampai prosesnya selesai, sehingga diperoleh data yang telah mencapai titik kejenuhan. Aktivitas dalam menelaah data kualitatif meliputi:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Mereduksi data dilakukan caranya berupa peringkasan, memilah informasi esensial, dan memfokuskan pada aspek penting, serta mendalami tema dan pola yang relevan dengan fokus kajian.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dilaksanakan melalui penyusunan keterangan hasil studi literatur agar memungkinkan penarikan kesimpulan yang sistematis. Data disajikan melalui dua pendekatan utama, yaitu klasifikasi tematik (data dikelompokkan berdasarkan tema utama penelitian, yaitu aktualisasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan taruna Politeknik Pengayoman Indonesia/Poltekin) dan analisis interpretatif yang digunakan untuk menafsirkan hubungan antara teori demokrasi Pancasila dengan praktik nyata di lingkungan taruna.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Proses penarikan kesimpulan pada kualitatif dilakukan guna menjawab atas rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan sejak awal mengenai bagaimana nilai-nilai demokrasi Pancasila diaktualisasikan dalam kehidupan taruna Poltekin.

3. Hasil dan Pembahasan

Profil Politeknik Pengayoman Indonesia

Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekin) merupakan lembaga pendidikan kedinasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diresmikan tanggal 8 Agustus 2024. Poltekin terbentuk melalui penggabungan dua lembaga pendidikan kedinasan yaitu Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) dan Politeknik

Imigrasi (Poltekim). Keduanya sebelumnya berdiri sebagai entitas pendidikan vokasi kedinasan yang memiliki sejarah panjang dalam menyiapkan aparatur negara dalam ranah pemsarakatan dan keimigrasian. Penggabungan ini dilandasi pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia.¹⁶ Regulasi tersebut menjadi landasan hukum penyatuan dua institusi menjadi satu lembaga terpadu yang lebih efisien, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan penguatan sumber daya manusia Kemenkumham.

Untuk merespons berbagai tantangan akibat dinamika perubahan nasional maupun global di bidang hukum, dibutuhkan pembaruan pendidikan dan peningkatan kompetensi aparatur Kementerian Hukum secara sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengintegrasian Politeknik Ilmu Pemasarakatan dan Politeknik Imigrasi menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia, Politeknik Pengayoman Indonesia atau Poltekin ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri yang berada di bawah kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum. Poltekin memiliki tugas untuk menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Sekarang Poltekin berada pada wewenang Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM Hukum). Posisi ini menegaskan bahwa Poltekin merupakan lembaga pendidikan kedinasan yang strategis dalam menyediakan sumber daya manusia profesional, berintegritas, dan berkarakter Pancasila untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang hukum. Poltekin memiliki tiga jurusan utama yang dikembangkan dari hasil penggabungan dua lembaga pendidikan sebelumnya, yaitu Poltekip dan Poltekim. Jurusan-jurusan tersebut mencakup bidang Ilmu Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Hukum

¹⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia," 17 § (2024).

¹⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia," 9 (2025).

Terapan.

1. Jurusan Ilmu Pemasarakatan

Jurusan ini membekali taruna dengan kompetensi untuk mengelola sistem pemasarakatan secara profesional, mulai dari aspek teknis operasional hingga manajemen kelembagaan dan pembinaan sosial.

a. Program Studi Teknik Pemasarakatan

Membekali taruna dengan keterampilan teknis dalam mengelola operasional lembaga pemasarakatan (lapas/rutan), termasuk keamanan, pengawasan, serta penggunaan sistem informasi pemasarakatan.

b. Program Studi Manajemen Pemasarakatan

Manajemen Pemasarakatan akan membekali taruna dengan kemampuan administrasi lembaga pemasarakatan, pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan pembinaan warga binaan, serta manajemen kelembagaan pemasarakatan.

c. Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan

Program studi ini mempersiapkan taruna untuk menjadi pembimbing kemasyarakatan (PK) profesional yang berperan dalam asesmen, pembinaan, dan reintegrasi sosial warga binaan.

2. Jurusan Keimigrasian

Jurusan ini dirancang untuk membentuk aparatur yang profesional di bidang layanan keimigrasian, pengawasan orang asing, serta regulasi dan administrasi keimigrasian.

a. Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian

Prodi ini menggabungkan manajemen dan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas layanan keimigrasian (misalnya melalui sistem informasi, pelayanan elektronik).

b. Program Studi Hukum Keimigrasian

Fokus pada aspek hukum keimigrasian: regulasi visa, izin tinggal, pengawasan orang asing, serta

perlindungan WNI/WNA. Sumber: laman Poltekim juga mencantumkan prodi D4 Hukum Keimigrasian.

c. Program Studi Administrasi Keimigrasian

Menekankan pelayanan administratif keimigrasian, manajemen dokumen dan prosedur keimigrasian, serta kepemimpinan layanan publik di bidang keimigrasian.

3. Jurusan Hukum Terapan

Jurusan ini merupakan pengembangan baru di Poltekin yang bertujuan melahirkan tenaga ahli hukum terapan di bidang administrasi, kebijakan, dan perancangan hukum.

a. Program Studi Pembangunan Hukum

b. Program Studi Administrasi Hukum Umum

c. Program Studi Hukum Terapan Kekayaan Intelektual

d. Program Studi Hukum Terapan Perancangan Perundang-undangan

Poltekin memiliki visi menjadi perguruan tinggi vokasi dan profesi yang terpercaya dalam mendidik dan mengembangkan talenta-talenta terbaik yang siap mengabdikan dengan etos kerja tinggi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Untuk mencapai visi tersebut, Poltekin memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan pengelolaan politeknik yang amanah.
3. Menyelenggarakan pembinaan sivitas akademika dalam kehidupan yang etis, ilmiah, profesional, dan berintegritas.
4. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak lain untuk peningkatan mutu dan sumber daya pada politeknik.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, khususnya misi menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, Demokrasi Pancasila diimplementasikan oleh Poltekin dalam sistem pendidikan dan kehidupan taruna sehari-hari yang bertujuan tidak hanya menekankan pada kebebasan dan partisipasi taruna, tetapi juga mengedepankan moral, tanggung jawab, dan keadilan sosial sesuai dengan kepribadian taruna yang sesungguhnya.

Makna Demokrasi Pancasila bagi Taruna

Istilah Demokrasi Pancasila mulai dikenal pada akhir tahun 1960-an, khususnya ketika Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Istilah ini digunakan untuk menggantikan konsep Demokrasi Terpimpin yang diterapkan pada masa Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Secara substansial, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pergantian istilah, tetapi juga mencakup hakikat, proses, mekanisme, serta praktik penyelenggaraan demokrasi di Indonesia.¹⁸

Demokrasi yang berlandaskan pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan sering kali dipersepsikan hanya berfokus pada sila keempat Pancasila. Padahal, penting dipahami bahwa seluruh sila Pancasila memiliki kedudukan yang setara, saling melengkapi, dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Dalam praktiknya, konsep demokrasi kerap disalahartikan sebagai kebebasan berpendapat tanpa batas, yang kemudian berujung pada tindakan anarkis, mengganggu ketertiban umum, bahkan merugikan kepentingan rakyat, meskipun pelakunya mengklaim bahwa mereka bertindak untuk membela rakyat. Padahal, pelaksanaan demokrasi harus tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila sehingga kebebasan yang dimiliki setiap warga negara tetap disertai tanggung jawab serta penghormatan terhadap hak orang lain dan kepentingan bersama.¹⁹

Menurut Darmodihardjo, Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang berakar pada kepribadian serta falsafah hidup bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.²⁰ Yudi Latif (2011) menegaskan bahwa dalam Demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat

absolut, melainkan harus diseimbangkan dengan tanggung jawab sosial.²¹ Sementara itu, Jimly Asshiddiqie menjabarkan bahwa prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila meliputi kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*), kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*), serta penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.²²

1. Kebebasan atau Persamaan (*Freedom/Equality*)

Kebebasan atau persamaan menjadi landasan utama dalam demokrasi. Kebebasan dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemajuan serta memungkinkan individu memperoleh hasil optimal dari usahanya tanpa campur tangan berlebihan dari penguasa. Melalui prinsip persamaan, setiap orang diperlakukan setara tanpa diskriminasi dan diberikan kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Namun, dalam Demokrasi Pancasila, kebebasan tidak dimaknai sebagai *free fight liberalism* seperti yang dikenal di Barat, melainkan sebagai kebebasan yang tetap menghormati hak dan kebebasan orang lain..

2. Kedaulatan Rakyat (*People's Sovereignty*)

Melalui konsep kedaulatan rakyat, setiap kebijakan yang dihasilkan merupakan cerminan kehendak rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Mekanisme semacam ini mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin kepentingan rakyat dalam pemerintahan. Pengawasan oleh rakyat menjadi perwujudan dari prinsip ini karena demokrasi tidak mempercayai sepenuhnya kebaikan hati penguasa.

3. Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab

Prinsip ini diwujudkan melalui:

- a. eberadaan Dewan Perwakilan Rakyat yang benar-benar mewakili rakyat.
- b. Lembaga peradilan yang independen dan

77, http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_inventa.

²⁰ Budiyo, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XI*, Jilid 2 (Jakarta: Erlangga, 2001).

²¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, ed. Idi Subandyo Purwanto (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

²² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, ed. Zainal A and M. Husien (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

¹⁸ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNPAD and Badan Pengkajian MPR, *Penegakan Demokrasi Pancasila*, ed. Tommy Andana et al. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020).

¹⁹ Aini Shifana Savitri and Dinie Anggraeni Dewi, "Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN DI ERA GLOBALISASI," *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 5, no. 2 (2021): 165–

- bebas dari intervensi.
- c. Kebebasan pers.
- d. Penerapan prinsip negara hukum.
- e. Adanya sistem kepartaian, baik dua partai maupun multipartai.
- f. Pelaksanaan pemilihan umum yang berlangsung secara demokratis.
- g. Penerapan prinsip suara mayoritas.
- h. Perlindungan terhadap hak-hak dasar serta hak-hak kelompok minoritas.

Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Namun, demokrasi kita masih cenderung bersifat prosedural, karena dalam proses pengambilan keputusan, praktik yang lebih sering dilakukan adalah voting daripada musyawarah untuk mufakat, padahal musyawarah merupakan asas asli demokrasi Indonesia.²³

Subiakto menegaskan bahwa inti demokrasi adalah kedaulatan rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat. Substansi demokrasi terletak pada musyawarah (demokrasi deliberatif) untuk mencapai kesepakatan bersama, bukan sebaliknya.²⁴ Demokrasi Pancasila adalah keseimbangan antara konflik dan konsensus, bekerja secara induktif, dan mengedepankan win-win solution. Demokrasi Pancasila juga bertanggung jawab bukan hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Tuhan, sehingga moralitas dan nilai agama menjadi bagian penting dari praktik demokrasi ini.

Kawamura menilai demokrasi Indonesia pada dasarnya dibangun atas prinsip musyawarah untuk mufakat sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan. Namun, dalam praktik politik modern, penggunaan voting semakin sering dilakukan ketika konsensus tidak tercapai, sehingga nilai-nilai musyawarah yang menjadi ciri khas Demokrasi Pancasila

cenderung mengalami pergeseran.²⁵

Dalam konteks pendidikan kedinasan di Indonesia, istilah taruna merujuk pada peserta didik atau mahasiswa yang menempuh pendidikan di lembaga/sekolah kedinasan pemerintah dengan sistem pendidikan berasrama dan berdisiplin tinggi. Untuk itu, kehidupan Taruna menjadi miniatur penerapan nilai-nilai demokrasi yang diwarnai oleh semangat musyawarah, disiplin, dan solidaritas korps. Secara etimologis, kata taruna berasal dari bahasa Sanskerta taruṇa yang berarti muda, pemuda, atau calon dewasa. Menurut KBBI, Taruna memiliki dua arti, yaitu pemuda atau pelajar/siswa sekolah calon perwira. Taruna sebagai calon aparatur negara yang ditempa melalui sistem pendidikan kedinasan memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu nilai fundamental tersebut adalah Demokrasi Pancasila, yang menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan dalam kehidupan kampus. Kehidupan Taruna di lingkungan sekolah kedinasan, seperti Politeknik Pengayoman Indonesia, merupakan cerminan dari sistem sosial yang kompleks tetapi teratur. Dalam konteks ini, Taruna belajar hidup bersama dalam keragaman latar belakang, karakter, dan kemampuan. Proses pembelajaran kolektif ini menjadi wadah untuk mempraktikkan prinsip musyawarah, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama, yang merupakan pilar utama Demokrasi Pancasila. Ini sejalan yang dijelaskan Furnamasari, nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan pendidikan dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap perbedaan, partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta pembiasaan musyawarah untuk mencapai mufakat.²⁶

Melalui kegiatan pendidikan, organisasi ketarunaan, serta interaksi sosial sehari-hari, mereka dilatih untuk menghargai perbedaan pendapat, bekerja sama, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi yang suatu

²³ Agustam, "Konsepsi Dan Implementasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indonesia," *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7 No.12, no. 1 (2011): 79–91, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1524/0>.

²⁴ Subiakto Tjakrawerdaja, Soenarto Soedarno, and P. Setia Lenggono, *Demokrasi Pancasila*, ed. Mohamad Zaelani, Cetakan I (Jakarta: Penerbit Universitas Trilogi,

2016).

²⁵ Koichi Kawamura, "Consensus and Democracy In Indonesia: Musyawarah-Mufakat Revisited," *Institute of Developing Economies (IDE-JETRO)* 308 (2011).

²⁶ Rizki Ramdani, Dinie ANggraeni Dewi, and Ayang Furi Furnamasari, "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan," *Jurnal Pendidikan Tambusana* 5, no. 3 (2021): 9034–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2417>.

bentuk nyata dari aktualisasi nilai demokrasi yang berkeadaban. Bagi Taruna, Demokrasi Pancasila tidak hanya dipahami sebagai sistem politik, tetapi juga sebagai etika sosial dan prinsip kepemimpinan. Nilai-nilai seperti persamaan hak, keadilan, kebebasan yang bertanggung jawab, dan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat menjadi pedoman dalam kehidupan organisasi Taruna maupun dalam proses belajar mengajar.

Pemimpin di antara Taruna tidak dipilih hanya berdasarkan latar belakang, tetapi juga pada kemampuan, integritas, dan tanggung jawab. Mekanisme ini mengajarkan bagaimana kekuasaan dijalankan dengan amanah dan mengedepankan kepentingan kolektif, sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlandaskan moralitas Pancasila. Walaupun kehidupan Taruna bersifat hierarkis dan disiplin ketat, nilai demokrasi tetap dapat diaktualisasikan dalam bentuk kepatuhan yang sadar, bukan paksaan, serta partisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil dan harmonis. Demokrasi Pancasila tidak berarti bebas tanpa batas, melainkan kebebasan yang dikendalikan oleh norma dan tanggung jawab moral.

Taruna diajarkan untuk berpikir kritis, menyampaikan aspirasi dengan santun, dan menerima keputusan bersama secara lapang dada. Ini merupakan bentuk penerapan demokrasi yang sesuai dengan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kegiatan pembinaan karakter, pelatihan kepemimpinan, dan pengajaran di kampus yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kedinasan berfungsi sebagai media internalisasi nilai-nilai demokrasi. Dalam kegiatan sosial, Taruna belajar berinteraksi langsung dengan masyarakat, menghargai hak-hak warga, serta menumbuhkan empati dan solidaritas sosial. Proses ini membantu Taruna untuk memahami bahwa demokrasi tidak hanya berlaku di dalam kampus, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial dalam menjaga keadilan, keteraturan, dan kesejahteraan masyarakat luas.

Sebagai calon pengayom masyarakat di masa depan, Taruna Politeknik Pengayoman

Indonesia diharapkan menjadi figur yang berjiwa Pancasila, berkarakter demokratis, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nilai-nilai demokrasi yang mereka pelajari dan praktikkan di lingkungan pendidikan akan menjadi fondasi moral dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara di bidang pemasyarakatan. Dengan demikian, Demokrasi Pancasila bagi Taruna bukan hanya teori, melainkan pedoman hidup dan dasar etika profesi yang menuntun mereka dalam berpikir, bertindak, dan melayani masyarakat dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan.

Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Taruna

Secara etimologis, kata *aktualisasi* berasal dari kata *actual* yang berarti nyata, dan *actualization* berarti proses menjadikan sesuatu menjadi nyata atau terwujud. Menurut Maslow, aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi manusia untuk mengembangkan potensi diri sepenuhnya. Dalam konteks kehidupan berbangsa, aktualisasi dapat dimaknai sebagai proses mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku sehari-hari.²⁷ Menurut Kaelan, aktualisasi Pancasila berarti pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila dalam setiap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, aktualisasi tidak hanya bersifat personal, tetapi juga sosial dan kebangsaan.²⁸

Sedangkan demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang berdasarkan pada partisipasi rakyat, oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat atau masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Maka, kedaulatan rakyat merupakan landasan terpenting yang harus ditegakkan. Prinsip ini menekankan bahwa kekuasaan politik ada di tangan rakyat dan mereka berhak menentukan pilihan pemimpinnya melalui mekanisme hak pilih universal yang demokratis. Demokrasi juga mengedepankan prinsip-prinsip seperti kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan aturan hukum.

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum merupakan sarana utama untuk menyampaikan pilihan politik dan menentukan para wakil rakyat. Konsep demokrasi selalu erat kaitannya dengan dasar negara. Pancasila kini telah menjadi ideologi dan falsafah kehidupan masyarakat.²⁹ Menurut

an-Pancasila-Prof-Dr-Kaelan-M-S-pdf.

²⁹ Afra Mudrikah et al., "Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Di Era Digital," *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 290–303,

²⁷ A Maslow, "Motivation and Personality. - PsycNET," *Motivation and Personality*, 1970.

²⁸ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* (Paradigma, 2010), <https://www.scribd.com/document/389765991/Pendidik>

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

Soekarno, demokrasi Indonesia bukan hanya demokrasi politik, tetapi juga demokrasi yang berkeadilan sosial dan berlandaskan moralitas ketuhanan.³⁰ Kaitannya dengan Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, Demokrasi Pancasila diartikan sebagai sistem demokrasi yang berpegang pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Pancasila dengan menggunakan hukum untuk mengatur negara yang berdemokrasi.

Aktualisasi Demokrasi Pancasila dapat dimaknai sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam perilaku demokratis di kehidupan nyata, yakni bersikap adil, bermusyawarah, menghargai perbedaan, menjunjung tanggung jawab, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Berikut Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia dengan unsur Demokrasi Pancasila menurut Ayu Putri.³¹

1. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Menurut Ayu Putri³², nilai kerakyatan menekankan bahwa setiap individu memiliki hak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui wakilnya, dengan dasar kebijaksanaan dan tanggung jawab moral. Prinsip ini diuraikan pula oleh Sudrajat (2024)³³ dalam *Mozaik: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* bahwa Demokrasi Pancasila tidak hanya berbicara tentang

mayoritas, melainkan tentang keputusan yang mencerminkan kehendak bersama berdasarkan pertimbangan etis dan moral. Selaras dengan itu, Harianto³⁴ dalam *Edukasia: Jurnal Pendidikan* menyebut bahwa lembaga pendidikan perlu menciptakan ruang dialog dan kepemimpinan yang kolektif agar peserta didik mampu menginternalisasi nilai partisipatif dan tanggung jawab bersama. Musyawarah harus membuka ruang argumen, mendengar kelompok minoritas, dan mengambil keputusan yang bijak.

Ini sejalan dengan pendidikan vokasi dan kedinasan seperti POLTEKPIN yang berperan strategis dalam membentuk pola pikir demokratis dan tanggung jawab kolektif di kalangan Taruna. Prinsip ini tampak dalam mekanisme pemilihan Komandan Resimen Taruna (Danmen) dan Kepala Dewan Musyawarah Taruna (Demustar) yang dilakukan secara demokratis, transparan, dan disertai tanggung jawab moral. Taruna belajar memahami bahwa keputusan kolektif tidak semata-mata soal suara terbanyak, tetapi tentang kebijaksanaan bersama.

2. Musyawarah untuk Mufakat

Nilai ini menjadi inti dari Demokrasi Pancasila, Ayu Putri³⁵ menekankan pentingnya proses deliberatif dalam mencapai kesepakatan, bukan kompetisi. Manganti³⁶ dalam *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* menegaskan bahwa musyawarah adalah sarana pendidikan moral yang melatih warga untuk menghargai perbedaan pandangan dan mengutamakan kesepakatan bersama. Sementara itu, Rahmawati³⁷ dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* menyoroti bahwa musyawarah juga berfungsi sebagai

<https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3320>.

³⁰ Soekarno, *PENEMUAN KEMBALI REVOLUSI KITA (THE REDISCOVERY OF OUR REVOLUTION)* (Jakarta, 1959), <https://marnette.home.xs4all.nl/scans/overheid/kembali.pdf>.

³¹ Nabila et al., “Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Memerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga.”

³² Nabila et al.

³³ Ajat Sudrajat, “Demokrasi Pancasila Dalam Prespektif Sejarah,” 2016, 1–17.

³⁴ Dedi Harianto, “Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menciptakan Masyarakat Demokratis Dan Berkeadilan,” *Edukasia Jurnal Pendidikan* 2, no. 1

(2025): 8–13, <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/bje/article/view/84>.

³⁵ Nabila et al., “Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Memerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga.”

³⁶ Ghaida Shaumi Manganti, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik,” *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 11 (2023): 380–89, <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>.

³⁷ Resa Kurnia Rahma, “Mengakar Pancasila Dalam Diri Mahasiswa: Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Kampus Melalui Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* 3 (2025): 67–77, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

sarana pembentukan kepemimpinan sosial berbasis empati dan komunikasi dua arah. Nilai musyawarah merupakan pilar dalam pembinaan Taruna untuk melatih kemampuan kepemimpinan partisipatif dan dialogis.

Dalam praktik organisasi Taruna (Korps Resimen, Demustar, Poltar, Pasustar, Marching Band), rapat kerja, briefing, debrief, dan koordinasi kegiatan rutin menjadi arena musyawarah: penyusunan program kerja, evaluasi latihan, dan pembagian tugas dilakukan lewat rapat berjenjang sehingga mufakat menjadi praktik sehari-hari. Proses kegiatan internal ini mencerminkan praktik nyata demokrasi deliberatif.

3. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Ayu Putri³⁸ menekankan bahwa Demokrasi Pancasila harus memastikan keadilan sosial sebagai tujuan akhir sistem politik dan sosial. Hasibuan³⁹ dalam *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)* menafsirkan keadilan sosial sebagai penyetaraan kesempatan, perlakuan, dan penghargaan terhadap setiap individu tanpa diskriminasi. Setiawan⁴⁰ dalam *Jurnal Civic Education* menambahkan bahwa lembaga pendidikan wajib menanamkan nilai keadilan sosial dalam kebijakan dan kultur kampus. Keadilan sosial dalam konteks pendidikan berarti akses, perlakuan, dan perlindungan setara bagi semua peserta; lembaga pendidikan harus mencegah diskriminasi, memberikan kesempatan berkembang, dan menjamin keselamatan peserta (literatur *anti-bullying* dan keadilan pendidikan).

Di lingkungan Taruna, POLTEKPIN

melaksanakan program pendidikan praktik ke lapangan integritas (orientasi lapangan, praktik kerja lapangan, kuliah kerja nyata, magang, dilengkapi pesan etika, kampanye anti-kekerasan) dan diberitakan adanya komitmen institusi terhadap penegakan integritas/*anti-bullying*; kegiatan keagamaan yang terjadwal untuk semua kelompok agama juga menunjukkan upaya menciptakan perlakuan setara dan lingkungan inklusif. Praktik ini merefleksikan upaya mewujudkan keadilan sosial di lingkungan Taruna.

4. Partisipasi Rakyat

Menurut Ayu Putri⁴¹, Demokrasi Pancasila tidak dapat berjalan tanpa partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Manganti⁴² menambahkan bahwa pendidikan demokrasi harus memfasilitasi siswa atau Taruna untuk ikut dalam perumusan keputusan kolektif Anatasya dan Dewi⁴³ menunjukkan bahwa partisipasi di lingkungan pendidikan berperan penting dalam pembentukan karakter, moral, dan tanggung jawab. Partisipasi adalah indikator demokrasi sehat; pendidikan harus menumbuhkan keterlibatan aktif melalui organisasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan forum formal sehingga peserta menjadi subjek (bukan objek) pembelajaran demokrasi.

POLTEKPIN menanamkan semangat partisipatif agar Taruna tidak hanya menerima kebijakan, tetapi turut menyumbang ide dan keputusan. Taruna terlibat dalam berbagai kegiatan organisasi dan forum musyawarah, termasuk pemilihan struktural, kegiatan sosial, dan lomba antar-Taruna, kesiapan menjadi delegasi lomba/kompetisi, peran sebagai panitia kegiatan kampus, hingga outreach ke sekolah—semua memberi ruang partisipasi langsung. Laporan prestasi dan pengiriman kontingen (PORSIMAPTAR, Svara Spectra, festival

³⁸ Nabila et al., “Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Pemerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga.”

³⁹ Afra Mudrikah et al., “Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Di Era Digital.”

⁴⁰ Bartolomeus Samho and Rudi Setiawan, “Menelisik Relevansi Pancasila Sebagai Spiritualitas Hidup Bangsa Indonesia Yang Majemuk,” *Jurnal Civic Education* 6, no. 2 (2022): 113–24.

⁴¹ Nabila et al., “Konsep Dan Urgensi Demokrasi

Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Pemerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga.”

⁴² Manganti, “Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik.”

⁴³ Eryna Anatasya and Dinie Anggareni Dewi, “Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 291–304, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34133>.

kampus) mendokumentasikan bentuk partisipasi ini. Partisipasi aktif ini membentuk budaya demokrasi di lingkungan kampus kedinasan. Perlindungan Hak Asasi Manusia

5. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Ayu Putri⁴⁴ menjelaskan bahwa Demokrasi Pancasila memuliakan harkat manusia dan menjamin hak-hak dasarnya. Harianto⁴⁵ menegaskan bahwa penghormatan HAM harus menjadi fondasi setiap lembaga pendidikan agar peserta didik terbiasa dengan budaya anti-diskriminasi dan anti-kekerasan. Putri et al.⁴⁶ dalam Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa menyatakan bahwa lingkungan belajar yang menghargai kebebasan berpendapat dan perbedaan pendapat akan menghasilkan karakter yang demokratis. Terdapat hubungan positif antara kebijakan HAM di lingkungan POLTEKPIN (mekanisme pelaporan, program literasi HAM) dengan iklim belajar yang sehat untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan HAM di pendidikan kedinasan bukan berarti bebas tanpa batas, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Taruna mendapatkan ruang untuk beribadah sesuai agama masing-masing dan diharapkan menjaga toleransi. Adanya peraturan kehidupan Taruna yang mendukung anti-perundungan dan kekerasan fisik, serta sistem pengaduan bagi pelanggaran anti-perundungan dan kekerasan fisik yang telah disediakan oleh

Demustar melalui kotak saran/QR scan menunjukkan bahwa kampus menjaga HAM sebagai bagian dari budaya melindungi hak asasi manusia.

6. Mencegah Oligarki

Ayu Putri⁴⁷ mengingatkan bahwa Demokrasi Pancasila harus mencegah dominasi kekuasaan segelintir kelompok. Tambunan⁴⁸ menjelaskan bahwa oligarki dapat muncul ketika struktur kekuasaan tidak diimbangi oleh partisipasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kekuasaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir elite. Demokrasi menyatakan bahwa pencegahan konsentrasi kekuasaan (oligarki) memerlukan mekanisme rotasi kepemimpinan, transparansi, dan partisipasi luas.

Dalam konteks Taruna, pencegahan oligarki berarti menjaga agar tidak ada dominasi senioritas yang menutup ruang aspirasi junior. Dengan sistem pemilihan terbuka dan bergilir tiap angkatan (berbeda, hanya bisa satu periode), serta pembinaan langsung oleh pembina, maka kekuasaan organisasi Taruna tidak berpusat pada individu atau kelompok tertentu. Struktur ini menciptakan keseimbangan dan rotasi kepemimpinan yang sehat. Dokumentasi pelantikan/serah terima jabatan menjadi alat transparansi yang mengurangi risiko oligarki internal.

7. Keseimbangan antara Kebebasan dan Keadilan

Menurut Ayu Putri⁴⁹, kebebasan individu harus disertai tanggung jawab sosial. Fajar⁵⁰ menjelaskan bahwa kebebasan tanpa berlandaskan nilai-nilai Pancasila berpotensi menimbulkan penyimpangan terhadap ketertiban dan keadilan sosial. Firdaus et al.⁵¹ menegaskan

⁴⁴ Nabila et al., "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Pemerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga."

⁴⁵ Harianto, "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menciptakan Masyarakat Demokratis Dan Berkeadilan."

⁴⁶ Mas Fierna et al., "Pembelajaran Demokratis Sebagai Bentuk Pengembangan Karakter Sosial Peserta Didik," *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 2, no. 2 (2022): 2809–5154.

⁴⁷ Nabila et al., "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Pemerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga."

⁴⁸ Derwin Tambunan, "The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process," *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 2 (2023): 637–53, <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>.

⁴⁹ Nabila et al., "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Pemerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga."

⁵⁰ Aditya Fajar and Daniel Nicholaes, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sosial," *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2023): 139–48.

⁵¹ Fahmi Ramadhan Firdaus, Ratih Listyana Chandra, and Christo Sumurung Tua Sagala, "Meaningful Participation as People ' s Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State," *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31 (2024): 337–57.

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

bahwa keseimbangan antara kebebasan dan keadilan menjadi fondasi negara hukum demokratis yang menjamin partisipasi warga negara secara bermakna. Demokrasi Pancasila menuntut kebebasan yang bertanggungjawab kebebasan individu harus dibatasi oleh kepentingan keadilan sosial.

POLTEKPIN mengedepankan kebebasan yang terarah: Taruna boleh berekspresi, namun dalam batas etika kedinasan dan disiplin korps. Taruna bebas berorganisasi, berkreasi melalui organisasi yang tersedia atau kegiatan positif lainnya, tetapi tetap tunduk pada tata nilai dan kode etik kehidupan Taruna. Prestasi eksternal (*Svara Spectra*) dan festival kampus menjadi ruang kebebasan kreatif yang tetap mengikuti aturan institusi sebagai contoh keseimbangan kebebasan dan keadilan sosial di lingkungan kedinasan. Ini mencerminkan harmonisasi antara kebebasan individu dan keadilan kolektif.

8. Pembangunan yang Berkelanjutan

Ayu Putri⁵² menilai bahwa Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Rachmawaty⁵³ dalam *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik* menjelaskan bahwa pendidikan demokratis melalui Pendidikan Kewarganegaraan melahirkan generasi bangsa yang memiliki karakter, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan nasional. Pendidikan vokasi yang menggabungkan praktik lapangan, pengabdian masyarakat, dan penguatan karakter berkontribusi pada pembangunan SDM berkelanjutan.

Pendidikan kedinasan seperti POLTEKPIN diarahkan untuk mencetak aparatur yang berintegritas dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan hukum dan kemasyarakatan. Melalui kegiatan orientasi lapangan, praktik kerja lapangan,

kuliah kerja nyata, dan magang, serta pengembangan prodi hukum terapan (usulan prodi baru) menunjukkan upaya institusi menyiapkan Taruna yang dapat berkontribusi berkelanjutan bagi pembangunan hukum dan pelayanan publik. Kegiatan-kegiatan ini didokumentasikan dalam berita resmi Poltekipin.

Tantangan dalam Aktualisasi Demokrasi Pancasila

1. Budaya Senioritas dan Hierarki yang Berlebihan

Salah satu tantangan utama dalam aktualisasi nilai-nilai Demokrasi Pancasila di lingkungan Taruna Poltekipin adalah keberadaan budaya senioritas dan sistem hierarki yang kuat. Meskipun disiplin dan struktur komando penting untuk membentuk karakter tangguh, hierarki yang berlebihan dapat menimbulkan ketimpangan relasi sosial antara Taruna senior dan junior. Situasi ini berpotensi menimbulkan praktik perundungan (*bullying*), kekerasan simbolik, atau bentuk penekanan lain yang melemahkan nilai musyawarah dan kesetaraan sebagaimana ditekankan oleh Demokrasi Pancasila.

Penelitian Lohy⁵⁴ menjelaskan bahwa budaya senioritas dalam lingkungan pendidikan kedinasan sering berkembang menjadi sistem kekuasaan informal yang menciptakan ketidakadilan dan ketakutan. Hal serupa juga diungkapkan oleh Fadli⁵⁵ bahwa praktik senioritas di lembaga pendidikan memiliki korelasi kuat dengan munculnya kekerasan psikologis dan lemahnya rasa solidaritas antarpeserta didik. Dalam konteks Taruna, kondisi ini bertentangan dengan nilai sila keempat Pancasila "*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*" yang menghendaki partisipasi dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Budaya senioritas dapat menghambat proses internalisasi nilai-nilai demokrasi karena meniadakan ruang dialog dan rasa saling menghormati antarsesama individu

⁵² Nabila et al., "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Pemerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga."

⁵³ Shella Rachmawaty, "Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Penerus Bangsa," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik* 1, no. 1 (2023): 34–42,

<https://doi.org/10.61476/ngfs5b63>.

⁵⁴ Maisandra helena Lohy and Farid Pribadi, "Kekerasan Dalam Senioritas Di Lingkungan Pendidikan(Violence in Seniority in the Educational Environment)," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5, no. 1 (2021): 159–71.

⁵⁵ Muhammad Rizki Fadli and Yani Osmawati, "Budaya Senioritas Sebagai Penyebab Kekerasan Pelajar (Studi Kasus SMA X Jakarta Selatan)," *Jurnal Anomie* 4 (2022): 130–49.

yang setara⁵⁶

2. Ruang Ekspresi yang Terbatas Akibat Budaya Komando

Budaya kedisiplinan tinggi di lembaga kedinasan seperti Poltekipin membentuk karakter taat perintah dan siap melaksanakan instruksi. Namun, sistem yang terlalu menekankan pada komando dapat mengurangi kesempatan Taruna untuk menyalurkan pendapat, ide, atau inisiatif. Hal ini menjadi paradoks terhadap prinsip Demokrasi Pancasila yang mengedepankan partisipasi aktif, tanggung jawab moral, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Ramadhan⁵⁷ dalam penelitiannya di *Jurnal JPPI* menunjukkan bahwa sistem pendidikan kedinasan yang sangat hierarkis memerlukan keseimbangan antara kedisiplinan dan dialog partisipatif. Pendidikan vokasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, misalnya, perlu membuka ruang “musyawarah Taruna” untuk menumbuhkan sikap demokratis tanpa mengurangi aspek ketertiban. Oleh karena itu, pembentukan kultur akademik yang komunikatif dan menghargai kebebasan berpendapat menjadi langkah penting dalam membangun karakter Taruna yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Pengaruh Budaya Digital dan Globalisasi

Tantangan berikutnya adalah pengaruh budaya digital dan arus globalisasi terhadap pembentukan nilai-nilai Taruna. Generasi Taruna Poltekipin hidup di era media sosial yang memungkinkan arus informasi cepat, namun juga membawa risiko polarisasi dan penyebaran nilai-nilai individualistik yang tidak selaras dengan semangat gotong royong.

Tarsidi⁵⁸ menyebutkan bahwa

⁵⁶ Fadli and Osmawati.

⁵⁷ Bagas Desta Ramadhan et al., “The Relationship between the Zero-Violence Program in Improving Cadet Parenting Patterns at BPSDM Transportation Service Schools,” *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (2024): 219, <https://doi.org/10.29210/020243666>.

⁵⁸ Deni Zein Tarsidi et al., “Social Media Usage and Civic Engagement among Indonesian Digital Natives: An Analysis,” *Jurnal Civics: Media Kajian*

penggunaan media sosial oleh mahasiswa di Indonesia memiliki dua sisi: membuka ruang ekspresi demokratis, tetapi juga mengikis nilai kebersamaan jika tidak disertai literasi digital berbasis nilai Pancasila. Penelitian serupa oleh Ali⁵⁹ dalam *Jurnal Pendidikan PKN* menunjukkan bahwa paparan budaya global dapat menimbulkan dilema identitas nasional, sehingga pendidikan kewarganegaraan perlu diintegrasikan secara kontekstual dengan teknologi digital. Dalam konteks Taruna, internalisasi Demokrasi Pancasila perlu dilakukan melalui pembinaan literasi digital yang menanamkan kesadaran moral, etika, dan kebangsaan. Demokrasi digital tanpa fondasi nilai Pancasila berisiko menjadi demokrasi prosedural tanpa substansi moral.⁶⁰

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Demokrasi Pancasila telah teraktualisasi secara nyata dalam kehidupan Taruna Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekipin) melalui sistem pendidikan, organisasi ketarunaan, serta pembinaan karakter di lingkungan kampus kedinasan. Prinsip-prinsip seperti musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, partisipasi aktif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab moral menjadi pilar utama dalam membentuk kepribadian Taruna yang berjiwa demokratis dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Kehidupan Taruna di Poltekipin mencerminkan praktik demokrasi deliberatif yang menyeimbangkan disiplin hierarkis dengan semangat partisipatif. Melalui kegiatan organisasi, pembelajaran, dan pembinaan, Taruna dilatih untuk berpikir kritis, bersikap adil, menghargai perbedaan, serta mengutamakan kepentingan bersama. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti budaya senioritas yang berlebihan, keterbatasan ruang ekspresi akibat budaya komando, serta

Kewarganegaraan 19, no. 1 (2023): 1382–90, <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.19.1.1494>.

⁵⁹ Muh Ali and Eko Bambang Mudiarsyah, “Influence of Social Media on Civic Attitudes in the Democratic Context of Sma Students,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 6, no. 2 (2025): 361–77, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i2.93945>.

⁶⁰ Tarsidi et al., “Social Media Usage and Civic Engagement among Indonesian Digital Natives: An Analysis.”

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

pengaruh globalisasi digital yang berpotensi melemahkan penerapan nilai-nilai demokrasi secara substantif.

5. Saran

Bagi Poltekpin perlu memperkuat sistem pembinaan Taruna berbasis nilai-nilai Demokrasi Pancasila melalui forum musyawarah, pelatihan kepemimpinan demokratis, serta penerapan budaya organisasi yang partisipatif dan inklusif. Bagi Pembina dan Dosen diharapkan mampu menjadi teladan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran dan interaksi sosial di lingkungan kampus.

Sedangkan Taruna penting untuk terus menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan menjadikan nilai-nilai Demokrasi Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan. Untuk Peneliti Selanjutnya dapat melakukan kajian lebih mendalam dengan pendekatan empiris atau studi komparatif antar lembaga kedinasan untuk memperkaya pemahaman tentang praktik demokrasi dalam konteks pendidikan karakter aparatur negara.

Referensi

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (March 1, 2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Afra Mudrikah, Eka Fajri Jayanti, Tasya Chika Setiaulia, Teuku Aditya Rian Syaputra, and Hamdi Abdullah Hasibuan. "Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Di Era Digital." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 4, no. 4 (2024): 290–303. <https://doi.org/10.55606/cendekia.v4i4.3320>.
- Agustam. "Konsepsi Dan Implementasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indonesia." *Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 7 No.12, no. 1 (2011): 79–91. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/view/1524/0>.
- Ajat Sudrajat. "Demokrasi Pancasila Dalam Prespektif Sejarah," 2016, 1–17.
- Ali, Muh, and Eko Bambang Murdiansyah. "Influence of Social Media on Civic Attitudes in the Democratic Context of Sma Students." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 6, no. 2 (2025): 361–77. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v6i2.93945>.
- Amelia, Refi, Deah Irena, and Siti Tiara Maulia. "Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Politik Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2023): 3–8. <https://doi.org/10.572349/civilia.v1i1.328>.
- Anatasya, Ervina, and Dinie Anggareni Dewi. "Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Peserta Didik Sekolah Dasar." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 2 (2021): 291–304. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/34133>.
- Arif, Dikdik Baehaqi. *Pendidikan Kewarganegaraan: Pendidikan Politik Dan Wawasan Kebangsaan Di Perguruan Tinggi*. Edited by Maulana Aenul Arif. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Edited by Zainal A and M. Husien. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Budiyanto. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas XI*. Jilid 2. Jakarta: Erlangga, 2001.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Jakarta: Rajawali Pers." *MidSens'09 - International Workshop on Middleware Tools, Services and Run-Time Support for Sensor Networks, Co-Located with the 10th ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference*, 2020, 1–6.
- Elliott, John E. "Joseph A. Schumpeter and the Theory of Democracy." *Review of Social Economy* 52, no. 4 (1994): 280–300. <https://doi.org/10.1080/758523325>.
- Fadli, Muhammad Rizki, and Yani Osmawati. "Budaya Senioritas Sebagai Penyebab Kekerasan Pelajar (Studi Kasus SMA X

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

- Jakarta Selatan)." *Jurnal Anomie* 4 (2022): 130–49.
- Fajar, Aditya, and Daniel Nicholaes. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sosial." *Indigenous Knowledge* 1, no. 2 (2023): 139–48.
- Fierna, Mas, Aqil Naufal, Ismail Aji, Taufik Maulana, and Adi N Febrianus. "Pembelajaran Demokratis Sebagai Bentuk Pengembangan Karakter Sosial Peserta Didik." *Jurnal Mahasiswa Karakter Bangsa* 2, no. 2 (2022): 2809–5154.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, Ratih Listyana Chandra, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Meaningful Participation as People ' s Sovereignty Form in Democratic Rule of Law State." *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM* 31 (2024): 337–57.
- Hariato, Dedi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Menciptakan Masyarakat Demokratis Dan Berkeadilan." *Edukasia Jurnal Pendidikan* 2, no. 1 (2025): 8–13. <https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/bje/article/view/84>.
- Indonesia, Republik. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia, 17 § (2024).
- . Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Pengayoman Indonesia, 9 § (2025).
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma, 2010. <https://www.scribd.com/document/389765991/Pendidikan-Pancasila-Prof-Dr-Kaelan-M-S-pdf>.
- Kawamura, Koichi. "Consensus and Democracy In Indonesia: Musyawarah-Mufakat Revisited." *Institute of Developing Economies (IDE-JETRO)* 308 (2011).
- Kurnia Rahma, Resa. "Mengakar Pancasila Dalam Diri Mahasiswa: Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan Kampus Melalui Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN* 3 (2025): 67–77. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna*. Edited by Idi Subandy Purwanto. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Lohy, Maisandra helena, and Farid Pribadi. "Kekerasan Dalam Senioritas Di Lingkungan Pendidikan(Violence in Seniority in the Educational Environment)." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 5, no. 1 (2021): 159–71.
- Manganti, Ghaida Shaumi. "Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Kebijakan Publik." *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 3, no. 11 (2023): 380–89. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2053>.
- Maslow, A. "Motivation and Personality. - PsycNET." *Motivation and Personality*, 1970.
- Melviana, Dhea Amanda Putri, Al Qomariah, Nur Hodijahtun Nisa, Rana Gustian, and Nugraha. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2253–59.
- Miles, Mathew B; Huberman, A. Michael. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI -Press), 1992.
- Moonti, Roy Marthen, and Muten Nuna. "Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Independency of Social-Political Rights and Participation of Citizen in Democratic System In." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 110–24.
- Nabila, Putri Ayu, Padilatul Ilmi Nst, S Intan, Siti Fatimah, Bambang Trisno, Alamat Jl, Gurun Aua, Kubang Putih, and Kec Banuhampu. "Konsep Dan Urgensi Demokrasi Pancasila Antara Prinsip-Prinsip Demokrasi Dan Nilai-Nilai Indonesia . Hal Ini Mencerminkan Keterkaitan Memerintah Dengan Perantaraan Wakilnya ; Pemerintahan Rakyat . Kemudian , Demokrasi Juga." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024).
- Oktari, Devyanne, and Dinie Anggraeni Dewi. "Pemicu Luntarnya Nilai Pancasila Pada Generasi Milenial." *JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2021): 93–103.

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2026

- <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1170>.
- Putra, Bintang Adi, Bimantoro Yusuf Habibie, Akbar Muhammad Ramadhan, M.Luthfi Arya Putra, and Nazwatul Khusna. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Perspektif Konsep Dan Teknik Analisis Dalam Kajian Yuridis." *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner* 10, no. 4 (2026): 97–112.
- Rachmawaty, Shella. "Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Penerus Bangsa." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik* 1, no. 1 (2023): 34–42. <https://doi.org/10.61476/ngfs5b63>.
- Ramadhan, Bagas Desta, Yeti Komalasari, Sukahir Sukahir, Jhellyananda Putri, Randa Agusta Pratama, M. Agrist P. Ramadhan, and Minulya Eska Nugraha. "The Relationship between the Zero-Violence Program in Improving Cadet Parenting Patterns at BPSDM Transportation Service Schools." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 10, no. 2 (2024): 219. <https://doi.org/10.29210/020243666>.
- Ramdani, Rizki, Dinie ANggraeni Dewi, and Ayang Furi Furnamasari. "Implementasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan Tambusan* 5, no. 3 (2021): 9034–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jp tam.v5i3.2417>.
- Samaragrahira, Sekar Ar-ruum. "Partisipasi Politik Dalam Konsep Kedaulatan Rakyat" 2 (2023): 312–17.
- Samho, Bartolomeus, and Rudi Setiawan. "Menelisik Relevansi Pancasila Sebagai Spiritualitas Hidup Bangsa Indonesia Yang Majemuk." *Jurnal Civic Education* 6, no. 2 (2022): 113–24.
- Savitri, Aini Shifana, and Dinie Anggraeni Dewi. "Inventa: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Di Era Globalisasi." *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* 5, no. 2 (2021): 165–77.
- http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/jurnal_inventa.
- Sayoto, and Daryono. "Analisis Dampak Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Terhadap Perilaku Mahasiswa (Studi Kasus Di Kampus Universitas Semarang)." *Forum Ilmu Sosial* 46, no. 1 (2019): 83–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/fis.v46i1.21169>.
- Soekarno. *PENEMUAN KEMBALI REVOLUSI KITA (THE REDISCOVERY OF OUR REVOLUTION)*. Jakarta, 1959. <https://marnette.home.xs4all.nl/scans/overheid/kembali.pdf>.
- Susanto, Efendi. "Sila Ke-Empat Pancasila Dan Iklim Demokrasi Indonesia Saat Ini." *Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 1 (2021): 84–93. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.1.2021.84-93>.
- Tambunan, Derwin. "The Intervention of Oligarchy in the Indonesian Legislative Process." *Asian Journal of Comparative Politics* 8, no. 2 (2023): 637–53. <https://doi.org/10.1177/20578911231159395>.
- Tarsidi, Deni Zein, Karim Suryadi, Dasim Budimansyah, and Rahmat. "Social Media Usage and Civic Engagement among Indonesian Digital Natives: An Analysis." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 19, no. 1 (2023): 1382–90. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.19.1.1494>.
- Tjakrawerdaja, Subiakto, Soenarto Soedarno, and P. Setia Lenggono. *Demokrasi Pancasila*. Edited by Mohamad Zaelani. Cetakan I. Jakarta: Penerbit Universitas Trilogi, 2016.
- UNPAD, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, and Badan Pengkajian MPR. *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Edited by Tommy Andana, Siti Aminah, Otto Trengginas Setiawan, and Pradita Devis Dukarno. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020.